



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE**

**NOMOR : 2 Tahun 2022
171.7/539/2022**

TANGGAL : 23 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM
Jabatan : Bupati Majene
Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 59 Majene
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene

2. a. Nama : SALMAWATI DJAMADO, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene
b. Nama : M. IDWAR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene
c. Nama : ADI AHSAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene
Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48 Majene

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara. Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2023.

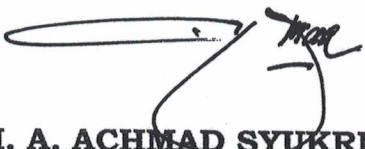
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Majene, 23 Agustus 2022

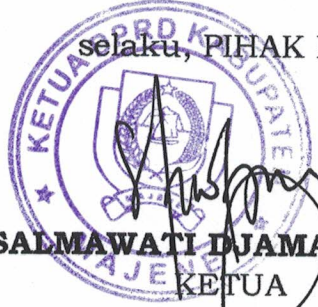
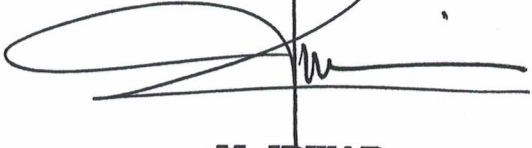
BUPATI MAJENE

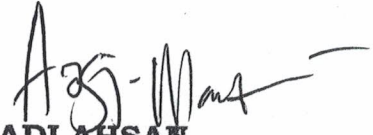
selaku, PIHAK PERTAMA


H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJENE

selaku, PIHAK KEDUA


SALMAWATI DJAMADO, SE
KETUA

M. IDWAR
WAKIL KETUA


ADI AHSAN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	7
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	232
	4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	233
	4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	384
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	386
BAB VI	PENUTUP	387

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023	7
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	26
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	58
Tabel 3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	92
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	233
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	384
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	386

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Pemerintah Kabupaten tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2023, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Pada akhirnya menghasilkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi pedoman penentuan pagu indikatif program/kegiatan OPD Tahun anggaran 2023

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun anggaran 2023, berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 87);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Periode 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 13);

20. Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 19);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	770.591.447.137	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.019.993.462	
4.1.01.	Pajak Daerah	15.184.764.909	• Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, • Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, • Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, • Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, • Perda Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, • Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, • Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, • Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pajak Bukan Logam dan Batuan, • Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan • Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.02.	Retribusi Daerah	10.467.519.377	• Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, • Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, • Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, • Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, • Perda Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, • Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, • Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, • Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, • Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, • Perda Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, • Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan • Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, • Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.333.308.081	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	52.034.401.095	-
4.2.	Pendapatan Transfer	676.571.453.675	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	651.561.453.675	• Berdasarkan 17/PMK.07/2021 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Tanggal 16 Februari 2021
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	25.010.000.000	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.000.000.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	13.000.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	770.591.447.137	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	770.601.447.137	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan, meliputi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, dan top down-bottom up. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2023 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kesenambungan antara prioritas daerah dengan prioritas Pemerintah pusat dan Provinsi sangat penting agar terjadi sinergitas pembangunan dari Pusat ke Kabupaten sehingga tercapai Indonesia Maju.

Dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023 telah dirumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan sasaran strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional maupun provinsi serta mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam visi misi Kepala Daerah terpilih. Dalam sasaran dan prioritas Daerah tersebut, juga melihat perkembangan kondisi sosial dan ekonomi dalam satu tahun terakhir akibat pandemi Covid 19. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 menjadi acuan bagi seluruh OPD dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah dan mewujudkan Tema RKPD tahun 2023 Kabupaten Majene yaitu Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan pemulihan Ekonomi berbasis potensi lokal.

Untuk itu program prioritas yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 ini memuat :

- a. Program Pemerintah Kabupaten Majene yang mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023. Ketujuh prioritas pembangunan nasional itu adalah sebagai berikut :
 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- b. Program Pemerintah Kabupaten Majene yang mendukung prioritas pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Sasaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 berfokus pada:
1. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
Fokus pada percepatan Infrastruktur pelayanan dasar pasca bencana gempa bumi
 2. Akselerasi Pembangunan Ekonomi
Fokus pada peningkatan usaha pertanian ketahanan pangan daerah, daya saing industri, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi dan lapangan kerja.
 3. Pembangunan Manusia
Fokus pada pelayanan Kesehatan serta gizi Masyarakat, Pendidikan berkualitas dan kondisi sosial yang lebih baik.
 4. Pemberdayaan lingkungan Hidup dan mitigasi bencana
Fokus pada peningkatan kualitas udara dan air yang baik serta optimalisasi tutupan lahan serat ketahanan bencana
 5. Penguatan tata Kelola pemerintahan modern
Fokus pada pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan APIP, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

c. Prioritas daerah Kabupaten Majene yang termuat dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023, yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
2. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di urusan pelayanan dasar
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Pembangunan Infrastruktur penunjang perekonomian dan pelayanan dasar
5. Peningkatan kelestarian hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam
6. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
7. Inovasi Daerah dalam pembangunan

Untuk lebih jelasnya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Ketahanan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama		
				Dinas Ketahanan Pangan	
			Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Desa Rawan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Hama Penyakit yang ditangani		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase kelembagaan Petani yang di Bina		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA		
				Sekretariat Daerah	
			persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA		
				Sekretariat Daerah	
			persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik		
				Sekretariat Daerah	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar SD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Kasar SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Murni SD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Murni SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Sekolah SD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Guru Paud, SD, SMP yang bersertifikasi		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			opini bpk		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Cakupan Program Pemberdayaan Sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
			Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase penempatan pencari kerja		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga PUG yang aktif		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Keluarga dan anak yang terlayani		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Pemenuhan Hak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			TFR (Total Fertility Rate)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Kampung KB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase peserta KB aktif MKJP		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Unmetneed		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang aktif		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Transmigrasi Umum		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitas layanan Kesra		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD		
				Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Perencanaan Daerah		
				Badan Perencanaan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi		
				Badan Perencanaan Daerah	
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi		
				Badan Perencanaan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%		
				Badan Perencanaan Daerah	
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%		
				Badan Perencanaan Daerah	
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%		
				Badan Perencanaan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Ketepatan waktu pengesahan APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Opini BPK		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase SiLPA Terhadap APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Inspektorat		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	
			Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	
			Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B		
				Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase sarana Persampahan Regional		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Akses Sanitasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase kondisi gedung pemerintah baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jembatan dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase permohonan IUJK yang terlayani		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			persentase perbaikan rumah akibat bencana		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase sertifikat yang di terbitkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
			Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan tanah		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Air		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Indeks Kualitas Udara		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Luas RTH yang tersedia		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Klasifikasi Adipura		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Cakupan area penanganan persampahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Persentase Jumlah sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase anggota linmas yang bersertifikasi		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Ulumanda		
				Kecamatan Ulumanda	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	

Tabel 3.2

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene
Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
73	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Opin BPK		
				Dinas Kesehatan	74.800.000
			Opini BPK		
				Dinas Kesehatan	46.696.505.576
			Opini BPK		
				Dinas Kesehatan	45.000.000
			Opini BPK		
				Dinas Kesehatan	382.400.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	120.000.000
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)		
				Dinas Kesehatan	27.544.813.939
			Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	11.712.000.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart		
				Dinas Kesehatan	526.950.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	8.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.283.216.668
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.721.650.000
			Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.721.650.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000.000
			Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentasi Akses Sanitasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.780.947.760
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.165.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Kondisi Gedung Pemerintah Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jembatan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.200.000.000
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.200.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.859.085
			Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.859.085
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.722.722.778
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	111.500.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.496.140.500
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.351.999.981
			Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.351.999.981

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Ketahanan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	2.180.207.822
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama		
				Dinas Ketahanan Pangan	199.425.520
			Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	199.425.520
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Desa Rawan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	32.373.793
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan	64.224.753
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.738.331
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.619.001
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang aktif		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan	18.303.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				dan Perindustrian	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Peningkatan Wirausaha Baru		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	20.016.850
			Persentase UMKM Yang Diberdayakan		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	20.016.850
			Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	20.016.850
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	349.999.985
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70.369.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Dokumen Strategi Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000
			Jumlah Nilai Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000
			Persentase kegiatan promosi penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	241.468.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	90.202.150
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	12.158.800
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	92.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	209.999.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	14.953.688.748
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	156.525.413

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	156.525.413
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	156.525.413
			Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	156.525.413
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	54.157.425
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	69.784.840
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Hama Penyakit yang ditangani		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	88.852.882
			Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	88.852.882
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	27.760.390
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase kelembagaan Petani yang di Bina		
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	64.475.740
			Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	64.475.740
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	262.002.800
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	69.978.225

				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	46.802.150
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase UTP yang bertanda Tera Sah		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	24.945.773
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	39.991.200
			Persentase Sentra Industri Aktif		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	39.991.200

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	14.638.291.244
			Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik		
				Sekretariat Daerah	14.638.291.244
			Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik		
				Sekretariat Daerah	14.638.291.244
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian		
				Sekretariat Daerah	255.000.000
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan		
				Sekretariat Daerah	255.000.000
			Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA		
				Sekretariat Daerah	255.000.000
			persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik		
				Sekretariat Daerah	255.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	65.453.385
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	122.000.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	26.200.000
74	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar SD		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Angka Partisipasi Kasar SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Angka Partisipasi Murni SD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Angka Partisipasi Murni SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Angka Partisipasi Sekolah SD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Angka Partisipasi Sekolah SMP		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11.295.429.470
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	20.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Guru Paud, SD, SMP yang bersertifikasi		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	119.968.080
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	37.000.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	2.104.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial		
				Dinas Sosial	2.504.332.859
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Cakupan Program Pemberdayaan Sosial		
				Dinas Sosial	9.640.000
			Persentase KAT yang ditangani		
				Dinas Sosial	38.197.863
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
				Dinas Sosial	15.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang tertangani		
				Dinas Sosial	75.258.313
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		
				Dinas Sosial	216.679.375
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
				Dinas Sosial	33.060.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
				Dinas Sosial	74.845.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	2.220.567.896

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga PUG yang aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.078.522.082
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.078.522.082
			Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.078.522.082
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.784.498
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Keluarga dan anak yang terlayani		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.522.123
			Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.522.123
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	21.836.963

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89.423.518
			Persentase Pemenuhan Hak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89.423.518
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.574.390.100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			TFR (Total Fertility Rate)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	235.400.000
			Persentase Kampung KB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan	235.400.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Keluarga Berencana	
			Presentase peserta KB aktif MKJP		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	235.400.000
			Unmetneed		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	235.400.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	4.181.819.250
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum		
				Dinas Perhubungan	80.200.000
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perhubungan	62.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	2.469.577.076
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	609.070.213
			Persentase PPID yang aktif		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	609.070.213
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks SPBE		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163
			Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163
			layanan yang sudah berbasis digital		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163
			Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	379.499.269
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	539.999.960

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	44.539.866
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	34.438.264
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	81.012.905
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.999.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	239.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	115.999.700
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.590.618
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.409.620
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.830.328.135
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase kelompok Literasi yang dibina		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.702.427
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.702.427
			Persentase Perpustakaan yang di bina		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.702.427
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.365.950
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	76.191.233
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	294.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.605.641.250

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.536.334
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Cakupan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam pengembangan politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.944.307.981
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di berdayakan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.162.875
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Peningkatan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.015.500
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.000.550
75	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.052.515.632
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.300.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial		
				Dinas Sosial	3.500.000
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.251.908.377
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.494.680
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Air		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300
			Indeks Kualitas Udara		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Luas RTH yang tersedia		
				Dinas Lingkungan	10.667.890

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.628.700
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.802.500
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Klasifikasi Adipura		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	61.343.670
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	14.871.343
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Cakupan area penanganan persampahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115
			Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115
			Persentase Jumlah sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115
			Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	122.565.933
76	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas		
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.567.203.790
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase anggota linmas yang bersertifikasi		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
			Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
			Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.719.700.898
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	149.993.833

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	149.993.833
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase penempatan pencari kerja		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	37.335.875
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	38.167.901
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.321.887.224
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Kepemilikan KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650
			Persentase Kepemilikan KK		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650
			Persentase Kepemilikan KTP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000
			Persentase Kepemilikan Akte		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase ketersediaan database kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.667.511
			Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.667.511
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.070.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.810.866.892
		PROGRAM PENATAAN DESA			

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.805.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	592.087.955
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.956.325

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks SPBE		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandiandan Statistik	50.000.000
			Jumlah Sistem informasi yang sudah terintegrasi		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandiandan Statistik	50.000.000
			Layanan yang sudah berbasis digital		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandiandan Statistik	50.000.000
			Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet		
				Dinas Komunikasi Informatika, Persandiandan Statistik	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian		
				Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.335.835.836
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.106.651.357
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	50.051.350
			Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	50.051.350
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.374.135
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.000.050
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Transmigrasi Umum		
				Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.007.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	14.863.895.500
			Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik		
				Sekretariat Daerah	14.863.895.500
			Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik		
				Sekretariat Daerah	14.863.895.500
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah		
				Sekretariat Daerah	3.298.995.000
			Persentase Fasilitasi layanan Kesra		
				Sekretariat Daerah	3.298.995.000
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan		
				Sekretariat Daerah	3.298.995.000
			Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD		
				Sekretariat Daerah	3.298.995.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Fasilitas Kebijakan Perekonomian		
				Sekretariat Daerah	885.000.000
			Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan		
				Sekretariat Daerah	885.000.000
			Persentase Fasilitas Kegiatan Pemantauan SDA		
				Sekretariat Daerah	885.000.000
			persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik		
				Sekretariat Daerah	885.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	15.184.719.160
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi		
				Sekretariat DPRD	5.968.882.740
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Perencanaan Daerah		
				Badan Perencanaan Daerah	4.053.205.640
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi		
				Badan Perencanaan Daerah	300.777.473
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi		
				Badan Perencanaan Daerah	300.777.473
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Daerah	694.433.722
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%		
				Badan Perencanaan Daerah	694.433.722
			Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%		
				Badan Perencanaan Daerah	694.433.722
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.078.272.190

				Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.622.000
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	8.688.918.826
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Ketepatan waktu pengesahan APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	111.650.422.171
			Ketepatan waktu penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449
			Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.093.534.722
			Opini BPK		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	111.650.422.171

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449
			Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.093.534.722
			Persentase silpa terhadap APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449
			Persentase SiLPA Terhadap APBD		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.093.534.722
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	521.157.018
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	695.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4.112.487.839
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.304.741.641
			Persentase data kepegawaian yang up to date		
				Badan Kepegawaian dan	1.304.741.641

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	
			Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.304.741.641
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	249.296.000
			Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi		
				Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	249.296.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penelitian dan Pengembangan		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	1.814.565.340
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	399.996.338
			Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	399.996.338
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Inspektorat		
				Inspektorat	5.602.726.700

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	999.550.000
			Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	999.550.000
			Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B		
				Inspektorat	999.550.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)		
				Inspektorat	300.450.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	39.537.300
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	7.203.410.802
			Persentase Penunjang urusan Pemeritahan Daerah		
				Kecamatan Pamboang	164.425.030
			Persentase Penunjang urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten Kota		
				Kecamatan Pamboang	145.550.600

				Kecamatan Sendana	3.798.550.957
				Kecamatan Tammerodo	1.580.839.590
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	2.073.190.368
			Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Ulumanda		
				Kecamatan Ulumanda	1.676.742.640

				Kecamatan Malunda	3.437.734.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Banggae	3.155.000
			Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	4.910.800
			Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Pamboang	18.800.000

				Kecamatan Sendana	8.000.000
				Kecamatan Tammerodo	49.600.000
			Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	8.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae		
				Kecamatan Banggae	35.495.629
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	521.505.550
			Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Pamboang	14.266.000
			PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Kecamatan Pamboang	48.000.000

				Kecamatan Sendana	206.616.837
				Kecamatan Tammerodo	24.960.000
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	11.127.500
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Ulumanda		
				Kecamatan Ulumanda	5.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Malunda	264.500.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	40.200.000

				Kecamatan Tammerodo	10.080.000
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Tubo Sendana		
				Kecamatan Tubo Sendana	10.000.000
			Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Ulumanda		
				Kecamatan Ulumanda	9.600.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Timur		
				Kecamatan Banggae Timur	7.077.250
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Pamboang	17.950.000

				Kecamatan Sendana	45.040.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Kecamatan Pamboang	4.800.000

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.168.168.334	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	111.500.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.496.140.500	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.351.999.981	
				Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.351.999.981	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi			
					Dinas Perumahan,	7.738.331	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.011.642.668	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
				Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.619.001	
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN						
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.849.650.004	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18.755.725.131	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah			
					Sekretariat Daerah	440.250.000	
				Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik			
					Sekretariat Daerah	440.250.000	
				Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik			
					Sekretariat Daerah	440.250.000	
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase Fasilitas Kebijakan Perekonomian			
					Sekretariat Daerah	706.798.090	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	706.798.090	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Pemantauan SDA			
					Sekretariat Daerah	706.798.090	
				persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik			
					Sekretariat Daerah	706.798.090	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000.000	
				Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase Akses Sanitasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.780.947.760	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.165.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase kondisi gedung pemerintah baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase jembatan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.200.000.000	
				Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.200.000.000	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.859.085	
				Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.859.085	
		Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup					
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.494.680	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks Kualitas Air			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300	
				Indeks Kualitas Udara			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.357.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Luas RTH yang tersedia			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10.667.890	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.628.700	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.802.500	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Klasifikasi Adipura			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	61.343.670	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	14.871.343	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Cakupan area penanganan persampahan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115	
				Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115	
				Persentase Jumlah sampah yang tertangani			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115	
				Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.052.115	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Indeks SPBE			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	50.000.000	
				Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	50.000.000	
				layanan yang sudah berbasis digital			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	50.000.000	
				Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	50.000.000	

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	37.000.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.999.530	
3	MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SERTA MEMUDAHKAN AKSES LAPANGAN PEKERJAAN						
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	240.000.000	
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)			
					Dinas Kesehatan	55.089.627.878	
				Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Kesehatan	23.424.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart			
					Dinas Kesehatan	1.053.900.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	16.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				TFR (Total Fertility Rate)			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	470.800.000	
				Persentase Kampung KB			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	470.800.000	
				Presentase peserta KB aktif MKJP			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	470.800.000	
				Unmetneed			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	470.800.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan	100.000.000	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Keluarga Berencana		
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan Pendidikan				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka Partisipasi Kasar SD				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Angka Partisipasi Kasar SMP				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Angka Partisipasi Murni SD				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Angka Partisipasi Murni SMP				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Angka Partisipasi Sekolah SD				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B				
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.568.263.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
			Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	40.000.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Guru Paud, SD, SMP yang bersertifikasi			
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	239.936.160	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan			
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	758.998.538	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan			
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.079.999.920	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Persentase kelompok Literasi yang dibina			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	269.404.854	
				Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	269.404.854	
				Persentase Perpustakaan yang di bina			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	269.404.854	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.731.900	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.000.000	
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah					

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga			
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	703.858.974.570	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas			
					Satuan Polisi Pamong Praja	16.701.611.370	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.157.546.896	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial			
					Dinas Sosial	7.523.498.577	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11.159.102.694	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.661.703.688	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Ketahanan Pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan	6.555.618.216	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.965.661.672	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.723.170.300	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	12.545.457.750	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	7.408.731.228	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	13.007.507.508	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.319.954.071	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga			
					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	788.991.639	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.444.086.332	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah			
					Sekretariat Daerah	88.244.299.701	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik			
					Sekretariat Daerah	88.244.299.701v	
				Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik			
					Sekretariat Daerah	88.244.299.701	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD			
					Sekretariat DPRD	45.554.157.480	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi			
					Sekretariat DPRD	17.906.648.220	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Perencanaan Daerah			
					Badan Perencanaan Daerah	12.159.616.920	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi			
					Badan Perencanaan Daerah	902.332.419	
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi			
					Badan Perencanaan Daerah	902.332.419	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%			
					Badan Perencanaan Daerah	2.083.301.166	
				Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%			
					Badan Perencanaan Daerah	2.083.301.166	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%			
					Badan Perencanaan Daerah	2.083.301.166	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.311.008.446	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Pendapatan Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	26.066.756.478	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Ketepatan waktu pengesahan APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.280.604.166	
				Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.280.604.166	
				Opini BPK			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.280.604.166	
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.280.604.166	
				Persentase SiLPA Terhadap APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.280.604.166	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan	12.337.463.517	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Sumber Daya Manusia		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	747.888.000	
				Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	747.888.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Penelitian dan Pengembangan			
					Badan Penelitian dan Pengembangan	5.443.696.020	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Inspektorat			
					Inspektorat	16.808.180.100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti			
					Inspektorat	2.998.650.000	
				Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			
					Inspektorat	2.998.650.000	
				Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B			
					Inspektorat	2.998.650.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)			
					Inspektorat	901.350.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae			
					Kecamatan Banggae	17.549.171.661	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.816.923.750	
		Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah				
					Sekretariat Daerah	3.298.995.000	
			Persentase Fasilitasi layanan Kesra				
					Sekretariat Daerah	3.298.995.000	
			Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan				
					Sekretariat Daerah	3.298.995.000	
			Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD				
					Sekretariat Daerah	3.298.995.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae			
					Kecamatan Banggae	26.200.000	
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama				
					Dinas Ketahanan Pangan	163.599.480	
			Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
					Dinas Ketahanan Pangan	163.599.480	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum				
					Dinas Perhubungan	160.400.000	
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik				
					Dinas Perhubungan	124.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase koperasi yang aktif				
					Dinas Koperasi, Industri Kecil	36.606.800	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	699.999.970	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	524.005.600	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	139.956.450	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	49.891.546	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	79.982.400	
				Persentase Sentra Industri Aktif			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan	79.982.400	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					dan Perindustrian		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian			
					Sekretariat Daerah	940.000.000	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	940.000.000	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA			
					Sekretariat Daerah	940.000.000	
				persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik			
					Sekretariat Daerah	940.000.000	
		Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase anggota linmas yang bersertifikasi			
					Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000	
				Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000	
				Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000	
				Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai			
					Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.300.000	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.700.000	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Kepemilikan KIA			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650	
				Persentase Kepemilikan KK			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650	
				Persentase Kepemilikan KTP			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.767.650	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000	
				Persentase Kepemilikan Akte			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000	
				Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.060.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase ketersediaan database kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.667.511	
				Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.667.511	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan			
					Dinas Kependudukan	10.070.000	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					dan Pencatatan Sipil		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	609.070.213	
				Persentase PPID yang aktif			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	609.070.213	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.304.741.641	
				Persentase data kepegawaian yang up to date			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.304.741.641	
				Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			
					Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	1.304.741.641	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae			
					Kecamatan Banggae	20.055.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae			
					Kecamatan Banggae	451.495.629	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae			
					Kecamatan Banggae	25.000.000	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat					
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase Transmigrasi Umum			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.007.000	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Indeks SPBE			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163	
				Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163	
				layanan yang sudah berbasis digital			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163	
				Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet			
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	988.512.163	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.000.050	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	34.438.264	
			Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase KAT yang ditangani			
					Dinas Sosial	114.593.589	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
					Dinas Sosial	45.000.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase PMKS yang tertangani			
					Dinas Sosial	225.774.939	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan			
					Dinas Sosial	650.038.125	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
					Dinas Sosial	99.180.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
					Dinas Sosial	224.535.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	449.981.499	
				Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	449.981.499	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase penempatan pencari kerja			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	112.007.625	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani			
					Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	114.503.703	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase Peningkatan Wirausaha Baru			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	60.050.550	
				Persentase UMKM Yang Diberdayakan			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	60.050.550	
				Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan			
					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	60.050.550	
		Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan	399.996.338	
				Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi			
					Badan Penelitian dan Pengembangan	399.996.338	
		Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Lembaga PUG yang aktif			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.157.044.164	
				Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.157.044.164	
				Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.157.044.164	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.568.996	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Persentase Keluarga dan anak yang terlayani			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.044.246	
				Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.044.246	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.673.926	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	178.847.036	
				Persentase Pemenuhan Hak Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	178.847.036	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84.000.000	
		---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	8.400.000	
				Opin BPK			
					Dinas Kesehatan	74.800.000	
				opini bpk			
					Dinas Kesehatan	46.696.505.576	
				opini BPK			
					Dinas Kesehatan	45.000.000	
				Opini BPK			
					Dinas Kesehatan	382.400.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	2.104.800.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Cakupan Program Pemberdayaan Sosial			
					Dinas Sosial	9.640.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.810.866.892	
			PROGRAM PENATAAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.972.800	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	586.671.050	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.956.325	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				

					Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	44.539.866	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.427.223.235	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

					Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	46.802.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.622.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Ketepatan waktu pengesahan APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449	
				Ketepatan waktu penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449	
				Opini BPK			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449	
				Persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449	
				Persentase silpa terhadap APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.556.887.449	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	579.519.160	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	695.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Penunjang urusan Pemeritahan Daerah			
					Kecamatan Pamboang	2.850.463.030	
				Persentase Penunjang urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten Kota			
					Kecamatan Pamboang	145.550.600	

					Kecamatan Tammerodo	1.580.839.590	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Pamboang	18.800.000	

					Kecamatan Tammerodo	49.600.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Pamboang	14.266.000	
			PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					Kecamatan Pamboang	48.000.000	

					Kecamatan Tammerodo	24.960.000	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

					Kecamatan Tammerodo	10.080.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Pamboang	17.950.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
					Kecamatan Pamboang	4.800.000	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.536.334	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Cakupan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam pengembangan politik			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.944.307.981	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di berdayakan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.162.875	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Peningkatan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.015.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.000.550	
4	PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI AGRIBISNIS, AGROTEKNOLOGI DAN AGROMARINE						
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	44.861.066.244	
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	313.050.826	
				Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	313.050.826	
				Persentase peningkatan produksi tanaman pangan			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	313.050.826	
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	313.050.826	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	108.314.850	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	139.569.680	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase Hama Penyakit yang ditangani			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	177.705.764	
				Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	177.705.764	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	55.520.780	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase kelembagaan Petani yang di Bina			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	128.951.480	
				Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
					Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	128.951.480	
5	PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN						
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	472.936.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	180.404.300	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	24.317.600	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	184.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian			
					Sekretariat Daerah	123.201.910	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	123.201.910	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA			
					Sekretariat Daerah	123.201.910	
				persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik			
					Sekretariat Daerah	123.201.910	
6	PENGENDALIAN HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK						
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Persentase Ketersediaan Pangan Utama			
					Dinas Ketahanan Pangan	235.251.560	
				Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			
					Dinas Ketahanan Pangan	235.251.560	
7	PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL						
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur			
					Kecamatan Banggae Timur	21.610.232.406	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tubo Sendana			
					Kecamatan Tubo Sendana	6.219.571.104	
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Ulumanda			
					Kecamatan Ulumanda	5.030.227.920	
		Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
				Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae Timur			
					Kecamatan Banggae Timur	40.200.000	
				Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Tubo Sendana			
					Kecamatan Tubo Sendana	10.000.000	
				Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Ulumanda			
					Kecamatan Ulumanda	9.600.000	
		Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Persentase Desa Rawan Pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan	64.747.586	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan	128.449.506	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian				
					Sekretariat Daerah	510.000.000	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan			
					Sekretariat Daerah	510.000.000	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA			
					Sekretariat Daerah	510.000.000	
				persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik			
					Sekretariat Daerah	510.000.000	
		Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			Dokumen Pengembagan iklim penanaman modal				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70.369.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)			

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	158.000.000	
				Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	50.051.350	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.374.135	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur			
					Kecamatan Banggae Timur	4.910.800	
				Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tubo Sendana			
					Kecamatan Tubo Sendana	8.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae Timur			
					Kecamatan Banggae Timur	521.505.550	
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana			
					Kecamatan Tubo Sendana	11.127.500	
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Ulumanda			
					Kecamatan Ulumanda	5.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Timur			
					Kecamatan Banggae Timur	7.077.250	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah					
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Dokumen Strategi Penanaman Modal			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000	
			Jumlah Nilai Investasi				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000	
				Persentase kegiatan promosi penanaman modal			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	210.000.000	

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.999.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	239.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	115.999.700	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.590.618	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.409.620	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.000.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	209.999.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)	Ket.
					Kecamatan Malunda	3.437.734.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

					Kecamatan Malunda	264.500.000	

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2023, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	265.055.117.870	
1.01.2.19.0.00.01.00.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	265.055.117.870	
1.01.2.19.0.00.01.00.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	264.394.629.114	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.970.529.434	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.928.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.990.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.980.500	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.997.500	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.960.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	232.701.581.450	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	232.413.785.600	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.800.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.830	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.996.020	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.059.770	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.770	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.060.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.185.008	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.223.733	
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.961.275	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program,
Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.511.206	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.838.350	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.964.750	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.349.106	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.625.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	235.900.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.834.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.744.000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.749.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.795.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.200.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.520.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.400.000	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.600.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.680.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.284.131.600	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.181.021.982	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	174.908.058	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	9.954.624	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.343.150	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	119.816.150	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	210.000.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.482.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.295.429.470	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	174.916.220	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	51.513.250	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	819.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.717.680.938	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	899.996.825	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	129.358.191	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	29.925.922	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.400.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	550.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	89.999.210	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.999.210	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	20.000.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.000.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	119.968.080	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	119.968.080	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.832.435	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.135.645	
1.01.2.19.0.00.01.00 01	UPTD Pendidikan Kec. Banggae Timur	92.865.248	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.865.248	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.400.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	935.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	935.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.078.498	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.515.925	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.482.573	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.580.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.900.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.900.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.551.750	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.084.250	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.467.500	
1.01.2.19.0.00.01.000 2	UPTD Pendidikan Kec. Banggae	111.395.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.395.542	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.400.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.950.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.950.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.231.339	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	898.925	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.712.414	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.170.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.450.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.806.038	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.806.038	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.793.500	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.793.500	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.214.665	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.970.665	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.060.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program,
Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.184.000	
1.01.2.19.0.00.01.000 3	UPTD Pendidikan Kec. Pamboang	103.406.030	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.406.030	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.400.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.500.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.420.030	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.771.850	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.458.180	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.090.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.100.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.900.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.128.000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.038.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.090.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.058.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.368.000	
1.01.2.19.0.00.01.00 04	UPTD Pendidikan Kec. Sendana	68.490.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.490.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.960.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.960.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.429.200	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.229.200	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.050.800	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.051.800	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.090.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.909.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.650.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.960.000	
1.01.2.19.0.00.01.00 05	UPTD Pendidikan Kec. Tammerodo	58.932.130	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.932.130	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.400.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.962.527	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.697.025	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.780.502	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	540.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.900.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.579.603	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.083	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.579.520	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.000	
1.01.2.19.0.00.01.00.06	UPTD Pendidikan Kec. Tubo Sendana	59.485.020	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.485.020	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.400.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.400.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.665.170	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.309.800	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.870.370	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	540.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.900.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.119.850	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.007.350	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.112.500	
1.01.2.19.0.00.01.00 07	UPTD Pendidikan Kec. Malunda	91.052.536	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.052.536	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.000.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.280.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.280.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.664.833	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.309.800	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.870.370	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	539.663	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.900.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.207.703	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.028.183	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.179.520	
1.01.2.19.0.00.01.00 08	UPTD Pendidikan Kec. Ulumanda	74.862.250	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.862.250	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.600.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.200.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.759.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.799.000	
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.960.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.441.250	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.653.750	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.467.500	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.862.000	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	640.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.072.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	126.215.269.515	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	126.215.269.515	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	75.398.469.515	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.198.705.576	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.686.505.576	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.530.505.576	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.146.000.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.400.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.800.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.800.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.664.813.939	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	120.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.544.813.939	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	30.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.277.620.976	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	500.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	137.192.963	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	500.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	526.950.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	486.950.000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SumberDaya Manusia Kesehatan	9.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	477.950.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan KompetensiTeknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	8.000.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan TindakLanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	8.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.00 01	Rumah Sakit Umum Daerah	39.104.800.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.000.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000.000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	37.000.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.104.800.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.104.800.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.104.800.000	
1.02.0.00.0.00.02.00 02	Puskesmas Banggae I	1.320.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.320.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.320.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.320.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.00 03	Puskesmas Banggae II	600.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	600.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.00 04	Puskesmas Totoli	1.428.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.428.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.428.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.428.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Lembang	1.332.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.332.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.332.000.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.332.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Pamboang	1.980.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.980.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.980.000.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.980.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Sendana I	1.620.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.620.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.620.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.620.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Sendana II	564.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	564.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	564.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Tammerodo	744.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	744.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	744.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	744.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Malunda	1.140.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.140.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.140.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.140.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Ulumanda	780.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	780.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	780.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	780.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Salutambung	204.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	204.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	204.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.470.733.513	
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.470.733.513	
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.470.733.513	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.287.276.668	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.212.625	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.910.250	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.820.800	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.694.875	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.646.500	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.324.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.816.200	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.653.688.550	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.246.463.400	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.300.000	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.377.500	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.514.900	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.899.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.133.750	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.308.900	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.640.900	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.668.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.908.400	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.100.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.996.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD	49.812.400	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.700.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.700.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.919.879	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.184.350	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	98.962.613	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.772.916	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.538.314	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	91.018.334	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPerizinan Alat Besar	115.262.300	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.197.680	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.721.650.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.280.000.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.010.000.000	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	270.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	441.650.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	41.650.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.000.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.000.000.000	
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	5.000.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.780.947.760	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.780.947.760	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.730.000.000	
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	44.347.760	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	6.600.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.165.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.165.000.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	3.160.000.000	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	605.000.000	
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	400.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.700.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.700.000.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.000.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.200.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.200.000.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	450.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.400.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	1.250.000.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	600.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	950.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.000.000.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	400.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000	
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	650.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	615.859.085	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	549.092.110	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, KonsultasiEvaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	29.186.100	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, KonsultasiEvaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	519.906.010	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	11.476.375	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	11.476.375	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4.858.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untukInvestasi dan Pembangunan Daerah	4.858.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.432.600	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	44.006.750	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	6.425.850	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.682.363.259	
1.04.2.10.0.00.03.00 00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.682.363.259	
1.04.2.10.0.00.03.00 00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.682.363.259	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.722.722.778	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.210.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.000	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.500.000	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.760.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.650.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.550.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.332.200.376	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.059.637.400	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.562.976	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.720.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.724.977	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.724.977	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.814.985	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.015.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.199.985	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.052.440	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.552.440	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	111.500.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	48.000.000	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	52.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	11.500.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	11.500.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.496.140.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.496.140.500	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	16.500.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.479.640.500	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.351.999.981	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.351.999.981	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	7.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.344.999.981	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.843.719.422	
1.05.0.00.0.00.05.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja	5.617.203.790	
1.05.0.00.0.00.05.00.00	Satuan Polisi Pamong Praja	5.617.203.790	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.567.203.790	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.078.764.120	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.402.587.800	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	671.176.320	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.830.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.830.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.600.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.600.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.659.670	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.759.670	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.900.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.350.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.180.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000	
1.05.0.00.0.00.06.00 00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.226.515.632	
1.05.0.00.0.00.06.00 00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.226.515.632	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.052.515.632	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.245.750	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.098.375	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.048.625	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.009.125	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.086.125	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.047.500	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.956.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.502.355.680	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.683.500	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	909.439.680	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.040.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.192.500	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.260.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.260.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.520.648	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.339.625	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.034.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.496.523	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.010.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.140.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.750.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.750.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.448.454	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.401.350	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.799.452	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.680.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.567.652	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.935.100	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.977.100	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.940.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.018.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	144.300.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	83.000.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	75.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	28.300.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.300.000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.000.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	8.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	29.700.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.700.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	21.700.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.970.513.410	
1.06.0.00.0.00.07.00 00	Dinas Sosial	2.970.513.410	
1.06.0.00.0.00.07.00 00	Dinas Sosial	2.970.513.410	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.507.832.859	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.070.353	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.930	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.434.525	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.599.470	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.301.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.999.208	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.736.220	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.020.248.880	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.963.444.100	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.800.000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.800	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.004.980	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.999.840	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.920	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.999.920	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.230.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.000.000	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.253.418	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.325	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.687.516	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.769.607	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.970	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.800.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.327.500	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.827.500	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.307.868	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.508.868	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.395.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.970.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.535.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.190.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	47.837.863	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	9.640.000	
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	9.640.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	38.197.863	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.297.863	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11.900.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15.000.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.000.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/KelurahanAsal	15.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	75.258.313	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	65.265.063	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	12.909.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	7.857.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.520.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, danSosial	1.200.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	8.750.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.400.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.429.063	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.100.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.500.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	1.600.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.993.250	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	9.993.250	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	216.679.375	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	216.679.375	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.679.375	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.400.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 57.600.00	0	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	33.060.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	33.060.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	10.200.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	2.760.000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.100.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	74.845.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	74.845.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.000.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5.645.000	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.200.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.945.198.507	
2.07.3.32.0.00.08.00 00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.945.198.507	
2.07.3.32.0.00.08.00 00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.945.198.507	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.719.700.898	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.855.037	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.139.083	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.219.183	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.219.205	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.549.225	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	419.543	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	449.443	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.859.355	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.220.435.153	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.083.547.000	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.888.928	
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.999.225	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.503.000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.503.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.873.570	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.421.650	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.130.920	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.900.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.421.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.969.680	
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.266.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.083.680	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.620.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.112.458	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.497.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.958.322	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.440.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.217.136	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.952.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.960.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.992.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	149.993.833	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	149.993.833	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	149.993.833	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37.335.875	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	37.335.875	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	37.335.875	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	38.167.901	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.563	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjasama Pengupahan	20.000.563	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	18.167.338	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.167.338	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.462.657.080	
2.08.0.00.0.00.09.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak	3.462.657.080	
2.08.0.00.0.00.09.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak	3.462.657.080	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.220.567.896	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.785.421	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.992.233	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.994.375	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.994.375	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.804.438	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.949.671.026	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.473.900	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.600.000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.036.938	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.560.188	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.454.500	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.902.500	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.450.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.102.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.400.345	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.765	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.580	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.400.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.256.604	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.164.604	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.040.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.032.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.078.522.082	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59.561.704	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	24.495.568	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	10.902.783	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	24.163.353	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.960.378	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	18.960.378	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	6.784.498	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.784.498	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.784.498	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.522.123	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.522.123	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.522.123	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	21.836.963	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.836.963	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	21.836.963	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	89.423.518	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.471.193	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.471.193	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33.952.325	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	20.063.925	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.888.400	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	42.000.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan PerlindunganKhusus Kewenangan Kabupaten/Kota	42.000.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.481.230.138	
2.09.0.00.0.00.10.00 00	Dinas Ketahanan Pangan	2.481.230.138	
2.09.0.00.0.00.10.00 00	Dinas Ketahanan Pangan	2.481.230.138	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.185.206.072	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.498.770	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.939	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.499.730	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.999.823	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.499.895	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.873	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.499.510	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.827.207.684	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.208.100	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	4.999.980	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.604	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.658.000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	20.058.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.097.899	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.250	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.608.500	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.991.624	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.605	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.999.920	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.823.719	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	13.823.719	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.920.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	34.170.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	199.425.520	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	84.649.660	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca BahanMakanan	13.710.850	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30.000.115	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	40.938.695	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	32.976.120	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.976.120	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	81.799.740	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.924.740	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan EvaluasiKonsumsi per Kapita per Tahun	30.875.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	32.373.793	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.373.793	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan PenyaluranCadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.373.793	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	64.224.753	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	64.224.753	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.389.200	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu danKeamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.835.553	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.035.000.000	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.035.000.000	
1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.035.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	7.738.331	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.738.331	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.738.331	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.011.642.668	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan SantunanTanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.011.642.668	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.011.642.668	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	15.619.001	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimumdan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.619.001	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	15.619.001	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.474.126.575	
2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.474.126.575	
2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.474.126.575	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.251.908.377	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.535.838	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.190.508	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.991.730	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.814.820	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.991.640	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.547.140	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.631.081.430	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.263.800	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.817.630	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.837.900	
2.11.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.589.900	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.248.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.531.300	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.196.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.250.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.860.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.550.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.220.000	
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.455.300	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.931.909	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.842.293	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.345.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	914.744.616	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.990.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	498.990.000	
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	40.494.680	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	40.494.680	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	40.494.680	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.357.300	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	55.357.300	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.234.100	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	46.123.200	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.667.890	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10.667.890	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.667.890	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6.628.700	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	6.628.700	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	6.628.700	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	9.802.500	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	9.802.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kabupaten/Kota		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.802.500	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	61.343.670	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.343.670	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61.343.670	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	14.871.343	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	14.871.343	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.255.643	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	9.615.700	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	23.052.115	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	20.552.500	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20.552.500	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.499.615	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	2.499.615	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.691.772.385	
2.12.0.00.0.00.12.00 00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.691.772.385	
2.12.0.00.0.00.12.00 00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.691.772.385	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.321.887.224	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.074.525	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.851.125	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.203.900	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.203.900	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.203.900	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.203.900	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.203.900	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.203.900	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.888.163.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.693.007.700	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.800.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.177.650	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.177.650	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.990.500	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.990.500	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.969.420	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.150.270	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.786.550	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.832.600	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.472.000	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.472.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.017.779	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.753.125	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.064.654	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.200.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.200.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.200.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	311.087.650	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	296.460.150	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10.320.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	275.804.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.336.150	
2.12.02.2.01.06	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.000.000	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	5.027.500	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	5.027.500	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9.600.000	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.600.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	18.060.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	8.900.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.400.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4.500.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.000.000	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	5.000.000	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	4.160.000	
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	4.160.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	30.667.511	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	11.400.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.700.000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.700.000	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.800.000	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.800.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.657.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.657.500	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.810.011	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.810.011	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.070.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	10.070.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.070.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.587.721.057	
2.13.0.00.0.00.13.00 00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.587.721.057	
2.13.0.00.0.00.13.00 00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.587.721.057	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.810.866.892	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.944.635	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.946.945	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.998.690	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.999.375	
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.999.625	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.534.192.425	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.468.731.100	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.461.335	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.990	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.182.123	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.989.697	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.515.550	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.320.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.856.876	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.378.017	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.378.017	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.358.372	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.110.090	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.398.282	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.450.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.811.320	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.811.320	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	32.972.800	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	32.972.800	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	15.167.800	
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	17.805.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	42.837.135	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	42.837.135	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	42.837.135	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	615.087.905	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	615.087.905	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	22.999.950	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	28.416.855	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	37.165.025	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	155.450.705	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	21.131.925	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	26.874.080	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	16.353.235	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	300.999.530	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.696.600	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	85.956.325	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.956.325	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19.099.265	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13.694.470	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18.163.710	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.999.410	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.999.470	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.891.790.100	
2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.891.790.100	
2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.891.790.100	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.574.390.100	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.274.350.100	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.159.750.100	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.600.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	
2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.000.000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.544.000	
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.544.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.920.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.720.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.306.000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.306.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.270.000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.200.000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.880.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.000.000	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	4.000.000	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	7.000.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	7.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	7.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan PelaporanProgram KKBPK	7.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	235.400.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramKKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	167.400.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	167.400.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang PelayananKB	5.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	5.000.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB	11.000.000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	11.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	50.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	35.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	15.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.262.019.250	
2.15.0.00.0.00.15.00.00	Dinas Perhubungan	4.262.019.250	
2.15.0.00.0.00.15.00.00	Dinas Perhubungan	4.262.019.250	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.181.819.250	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.865.800	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.533.800	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	832.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.500.000	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.500.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.776.871.950	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.458.475.750	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	313.896.200	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.470.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.970.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.431.500	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.027.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.983.500	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.425.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.450.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.050.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.800.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.800.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.930.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.930.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	80.200.000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.200.000	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.200.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	10.000.000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	10.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.000.000	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.000.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	16.000.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.067.159.452	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	4.067.159.452	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	4.067.159.452	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.469.577.076	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.878.898	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.298	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.012.400	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.010.250	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.027.450	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.006.500	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.822.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.162.542.774	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.061.276.844	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.200.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.061.350	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.004.580	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.210.529	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.962.500	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.248.029	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.070.644	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.750	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.197.894	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.997.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.876.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.545.231	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.545.231	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.329.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.705.000	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.920.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.840.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.864.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	609.070.213	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	609.070.213	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	49.999.695	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	149.990.073	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	147.999.925	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	120.000.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	141.080.520	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	988.512.163	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	857.905.238	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	857.905.238	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130.606.925	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.949.975	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.000.000	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	8.104.950	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	53.552.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.724.156.071	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.724.156.071	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.724.156.071	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.335.835.836	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.094.895	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.702.305	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.924.225	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.526.885	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.223.345	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.526.665	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.191.470	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.417.319.835	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.406.205.950	
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.704.015	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.704.935	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.704.935	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.451.500	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.531.500	
2.17.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1.800.000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	15.120.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.942.630	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.630.750	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.439.080	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	214.130.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.600.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.142.800	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.466.976	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.448.760	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.392.841	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.625.375	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.560.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.480.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.100.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.320.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	18.303.400	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18.303.400	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.303.400	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	20.016.850	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan	20.016.850	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	15.050.850	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	4.966.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	349.999.985	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	349.999.985	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi	349.999.985	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.470.445.892	
2.18.0.00.0.00.18.00 00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.470.445.892	
2.18.0.00.0.00.18.00 00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.470.445.892	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.106.651.357	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.962.057	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.006.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.867.500	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.805.000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.965.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.923.557	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.392.500	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.644.280.876	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.172.600	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.400.000	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.990.938	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.716.900	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.438	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.838.250	
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.838.250	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.952.420	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.600.000	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.605.250	
2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.157.000	
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.580.170	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.010.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.321.741	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.020.241	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.020.500	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.745.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.041.000	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.795.000	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.200.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.634.000	
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.634.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.010.013	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.013	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.410.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.652.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.540.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.960.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.700.000	
2.18.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.200.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.020.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.232.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	70.369.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.369.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.340.000	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif danKemudahan Penanaman Modal	10.029.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50.051.350	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.051.350	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.000.350	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	8.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.051.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	23.374.135	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.374.135	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.763.250	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.380.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.230.885	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	10.000.050	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.050	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.050	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.182.496.442	
1.01.2.19.0.00.01.00 00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.182.496.442	
1.01.2.19.0.00.01.00 00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	919.499.229	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	379.499.269	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	379.499.269	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	24.999.550	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	354.499.719	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	539.999.960	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	510.000.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	29.999.960	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	29.999.960	
1.01.2.19.0.00.01.00 09	UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga	262.997.213	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.997.213	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.000.000	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.000.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.120.000	
2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.120.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.041.873	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	671.625	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.410.248	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	460.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.285.340	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.285.750	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.590	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.150.000	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.150.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	44.539.866	
2.16.2.20.2.21.16.00 00	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	44.539.866	
2.16.2.20.2.21.16.00 00	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	44.539.866	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	44.539.866	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.539.866	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44.539.866	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	34.438.264	
2.16.2.20.2.21.16.00 00	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	34.438.264	
2.16.2.20.2.21.16.00 00	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	34.438.264	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	34.438.264	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	34.438.264	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.438.264	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.866.222.773	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.866.222.773	
2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.866.222.773	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.427.223.235	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.239.277	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.482.677	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.592.500	
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.706.500	
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.553.500	
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.519.000	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.831.600	
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.553.500	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.634.221.443	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.593.046.500	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.999.025	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.625.690	
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.550.228	
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.871.550	
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.871.550	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.901.150	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.614.150	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.240.000	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.047.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.980.000	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.980.000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.106.473	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.058.700	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.047.773	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.000.000	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.903.342	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.227.342	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.176.000	
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	49.999.600	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.600	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	49.999.600	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	239.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	239.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	239.000.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	115.999.700	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.999.700	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	115.999.700	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	10.590.618	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10.590.618	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	6.419.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	4.171.618	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	23.409.620	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	23.409.620	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	23.409.620	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.997.583.050	
2.23.2.24.0.00.20.00 00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.997.583.050	
2.23.2.24.0.00.20.00 00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.997.583.050	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.862.880.623	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.167.750	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.424.500	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.291.250	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.085.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.931.625	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.745.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.690.375	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.553.296.750	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.403.503.000	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.400.000	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.903.750	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.690.000	
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.800.000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.486.120	
2.23.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.485.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.001.120	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.560.888	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.081.500	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.902.488	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.798.900	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.778.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.616.936	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.616.936	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.714.179	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.710.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.819.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.185.179	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.038.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.988.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.650.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.400.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	134.702.427	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.251.927	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	24.072.500	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.816.377	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	14.481.725	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	20.866.425	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	11.103.900	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.911.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.450.500	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	11.611.500	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	21.839.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	32.365.950	
2.23.2.24.0.00.20.000 0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.365.950	
2.23.2.24.0.00.20.000 0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.365.950	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	22.365.950	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	4.200.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	13.165.950	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5.000.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8.165.950	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5.000.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	5.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.138.084.981	
3.25.0.00.0.00.21.00 00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.138.084.981	
3.25.0.00.0.00.21.00 00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.138.084.981	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.702.256.031	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.696.890	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.625.262	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.741.094	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.817.163	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.815.210	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.013.800	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.730.367	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.953.994	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.170.256.405	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.011.928.400	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.528.005	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.695.743	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.695.743	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.553.755	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.000.000	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.495.755	
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.058.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.330.379	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.610.956	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.925.151	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.232.310	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.863.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.698.762	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.049.000	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.049.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.281.412	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.100.256	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.381.156	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.392.447	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.794.000	
3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.372.000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.430.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.796.447	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	241.468.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14.000.000	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	222.468.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	200.000.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	15.068.000	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.000.000	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	90.202.150	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	90.202.150	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.031.750	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.076.500	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.293.900	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.800.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.158.800	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	12.158.800	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4.079.400	
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	8.079.400	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	92.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.200.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.200.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14.800.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14.800.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	314.999.000	
2.22.3.26.0.00.19.00.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	314.999.000	
2.22.3.26.0.00.19.00.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	314.999.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	50.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	45.499.007	
3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	9.169.997	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	23.669.846	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	6.106.543	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	6.552.621	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	4.500.993	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	4.500.993	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	209.999.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	209.999.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalamdan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	189.999.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	55.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	55.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.415.245.438	
3.27.0.00.0.00.22.00 00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	15.415.245.438	
3.27.0.00.0.00.22.00 00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	15.415.245.438	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.953.688.748	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.552.137	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.864.263	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.549.618	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.549.653	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.129.633	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.235.115	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.223.855	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.253.034.973	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.152.845.400	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.525.015	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.433.333	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	13.043.790	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.187.435	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.760.110	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.760.110	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	15.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.278.700	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	111.339.700	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.439.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.650.828	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	45.599.259	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.550.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.501.569	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.412.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	38.830.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.582.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	156.525.413	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	44.131.648	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung PertanianSesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	32.712.290	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	11.419.358	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	19.966.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	19.966.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.427.765	
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	21.292.535	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	41.285.262	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	29.849.968	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	54.157.425	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	31.318.955	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	11.419.345	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	19.899.610	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	22.838.470	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	11.418.990	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11.419.480	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	69.784.840	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	19.967.660	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewandan Zoonosis	19.967.660	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.849.680	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	29.849.680	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	19.967.500	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	19.967.500	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	88.852.882	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	88.852.882	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	41.192.955	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	27.760.320	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19.899.607	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	27.760.390	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.760.390	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	27.760.390	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	64.475.740	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	64.475.740	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	25.400.079	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	15.447.968	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23.627.693	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	403.728.948	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	403.728.948	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	403.728.948	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	262.002.800	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.002.800	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	262.002.800	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	116.780.375	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	69.978.225	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	5.000.850	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	64.977.375	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	46.802.150	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	31.801.800	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	15.000.350	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	24.945.773	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	24.945.773	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	24.945.773	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.991.200	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	39.991.200	
2.17.3.30.3.31.17.00 00	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	39.991.200	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	39.991.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	39.991.200	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10.312.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	29.679.200	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.007.000	
2.07.3.32.0.00.08.00.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.007.000	
2.07.3.32.0.00.08.00.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.007.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.007.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.007.000	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.007.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	34.000.511.567	
4.01.0.00.0.00.23.00.00	Sekretariat Daerah	34.000.511.567	
4.01.0.00.0.00.23.00.00	Sekretariat Daerah	34.000.511.567	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.561.516.567	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.787.745	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.999.050	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.499.895	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.999.404	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.298.066	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.999.250	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.992.440	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.999.640	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.756.591.001	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.143.368.182	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.396.291.584	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.312.453	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.300.967	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.999.790	
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	49.319.025	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.999.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.278.948	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98.278.948	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.869.045.452	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.525.150	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.295.630	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137.810.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	439.334.672	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.013.080.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.140.073.908	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.063.600.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.473.908	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.829.928	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.829.928	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	721.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.735.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	438.090.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.645.000	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.250.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.750.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.002.613.755	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	762.613.755	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.120.370.830	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.983.393.298	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.161.595.532	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	975.382.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	400.000.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	170.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	130.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	342.190.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	73.063.730	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	66.445.270	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	202.681.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.298.995.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	230.000.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	55.002.153	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	24.998.188	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	149.999.659	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.483.995.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.339.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	75.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	69.995.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	400.000.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	146.962.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	143.364.400	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	109.673.600	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	185.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	116.068.480	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	24.288.560	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	44.642.960	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.140.000.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	255.000.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	52.461.927	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	85.788.873	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	116.749.200	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	230.000.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	39.920.375	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	88.812.335	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	101.267.290	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	470.000.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	226.299.740	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	183.700.630	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	59.999.630	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	185.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	61.600.955	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	61.799.200	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energidan Air	61.599.845	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	21.153.601.900	
4.02.0.00.0.00.24.00 00	Sekretariat DPRD	21.153.601.900	
4.02.0.00.0.00.24.00 00	Sekretariat DPRD	21.153.601.900	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.184.719.160	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.000.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.000.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.000.000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.000.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.000.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.000.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.535.877.500	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.337.500	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	426.540.000	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.000.000	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.000.000	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.000.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	80.000.000	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.000.000	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.980.000	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.990.000	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.990.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.000.000	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.000.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.000.000	
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.000.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.561.900	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.562.500	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.400	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.742.200	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.742.200	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.740.000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.940.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.800.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.190.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.890.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.300.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.144.627.560	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8.019.827.560	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	124.800.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	73.000.000	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50.000.000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	23.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5.968.882.740	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	263.860.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	109.950.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	90.940.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	20.970.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	42.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	134.950.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	24.990.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.990.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	24.990.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	24.990.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	10.000.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24.990.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	68.970.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	22.990.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.990.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	22.990.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	182.952.740	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	82.952.740	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	788.000.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	25.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	13.000.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	750.000.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	6.300.000	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	6.300.000	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	113.970.000	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	102.970.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	11.000.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.409.880.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.715.970.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	22.970.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	647.970.000	
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	22.970.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	5.048.416.835	
5.01.0.00.0.00.25.00 00	Badan Perencanaan Daerah	5.048.416.835	
5.01.0.00.0.00.25.00 00	Badan Perencanaan Daerah	5.048.416.835	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.053.205.640	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.384.225	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.356.100	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.354.375	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.356.350	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.962.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.049.500	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.187.650	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.118.250	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.400.691.550	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.329.657.700	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.891.600	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.626.500	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.770.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.745.750	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.449.500	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.449.500	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.034.250	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.502.250	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.532.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.353.010	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.600	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.991.410	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.362.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.819.445	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.149.445	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.670.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.509.260	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.882.250	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.027.010	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.600.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.964.400	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.750.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.940.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.274.400	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	300.777.473	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	188.527.148	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	7.194.423	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.616.750	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.054.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	67.623.050	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19.114.500	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	73.924.425	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	51.162.375	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.966.375	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	38.196.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	61.087.950	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	61.087.950	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	694.433.722	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	348.709.300	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.804.150	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.750.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.191.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	35.911.500	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.177.300	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.050.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149.530.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.295.350	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	160.496.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.605.425	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.050.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomian	9.591.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	45.805.625	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD danRKPD)	20.729.225	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.050.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA	9.801.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	41.864.025	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185.228.122	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.382.722	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.200.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur	10.001.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.136.400	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.218.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.200.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.101.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	47.988.500	
5.02	KEUANGAN	128.799.151.639	
5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.415.232.813	
5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.415.232.813	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.185.291.482	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.055.650	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.694.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.992.750	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.694.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.579.500	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.627.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.467.900	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.337.853.405	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.002.744.200	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	236.935.872	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.625.214	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.206.392	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.190.900	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.150.827	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.622.000	
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.430.000	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.830.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	52.362.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.136.305	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.378.305	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.258.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.037.225	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.444.625	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	221.792.600	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.800.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.586.897	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.429.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.379.122	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.778.275	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	111.650.422.17	
		1	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.510.412.825	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.262.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.898.513	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.679.463	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.534.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.052.976	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.845.526	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	987.274.268	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	156.865.626	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	69.251.079	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	85.682.911	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	84.066.463	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	583.121.897	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	176.776.550	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.328.500	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	133.457.476	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	81.449.661	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	45.208.150	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	57.153.400	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.748.160	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	576.015.220	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.290.080	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	55.884.860	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	37.713.210	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	49.300.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	166.827.550	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.020	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	199.999.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	108.980.872.229	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.300.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	107.680.872.229	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	579.519.160	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	579.519.160	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	42.159.325	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	37.176.670	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33.000.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	144.719.857	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	96.910.813	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	58.362.142	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.626.353	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110.564.000	
5.02.0.00.0.00.27.00 00	Badan Pendapatan Daerah	9.383.918.826	
5.02.0.00.0.00.27.00 00	Badan Pendapatan Daerah	9.383.918.826	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.688.918.826	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.697.170	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.000.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.697.170	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.032.218.184	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.772.218.184	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.000.000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.003.456	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.003.456	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.210.000.016	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.095.000.016	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	695.000.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	695.000.000	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10.000.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	20.000.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.000.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	50.000.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.000.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150.000.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100.000.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	5.417.229.480	
5.03.5.04.0.00.28.00.00	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	5.417.229.480	
5.03.5.04.0.00.28.00.00	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	5.417.229.480	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.112.487.839	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.207.684	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.642.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.505.250	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.337.900	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.505.250	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.425.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.791.784	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.749.159.294	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.600.166.500	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.323.160	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.669.634	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.434.847	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	659.500	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.879.657	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.495.690	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.400.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.662.500	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.450.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.012.500	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.023.514	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.973.514	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.050.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.304.741.641	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	181.542.981	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	100.736.340	
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	44.667.748	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4.764.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.838.582	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	9.536.311	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	350.893.545	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	122.873.550	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	128.019.995	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	100.000.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	710.499.765	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	120.499.820	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	510.000.000	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	79.999.945	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	61.805.350	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.672.250	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25.133.100	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	249.296.000	
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	249.296.000	
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	249.296.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	249.296.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	249.296.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	249.296.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.214.561.678	
5.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.214.561.678	
5.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.214.561.678	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.814.565.340	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.266.840	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.510.020	
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.544.500	
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.629.525	
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.014.445	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.529.240	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.929.935	
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.109.175	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.490.073.650	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.436.208.400	
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.522.650	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.660.500	
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.682.100	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.974.000	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.000.000	
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.974.000	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.850.850	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.642.750	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.992.100	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.656.000	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.794.000	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.994.000	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.606.000	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.470.000	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.010.000	
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.986.000	
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	399.996.338	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	249.997.580	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	249.997.580	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	49.999.892	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	49.999.892	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	99.998.866	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	69.998.866	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.902.726.700	
6.01.0.00.0.00.30.00.00	Inspektorat	6.902.726.700	
6.01.0.00.0.00.30.00.00	Inspektorat	6.902.726.700	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.602.726.700	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.142.146	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.000.000	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.142.146	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.947.033.200	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.833.200	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.200.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	12.000.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	8.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.400.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.400.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	100.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.500.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	21.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.866.354	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.380.000	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	29.486.354	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.735.000	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	41.535.000	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.050.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.350.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.200.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	999.550.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	889.550.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	100.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	40.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	100.000.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	200.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	149.550.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	110.000.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	300.450.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitasi Pengawasan	35.100.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.100.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	265.350.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	74.350.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	30.696.590.440	
7.01.0.00.0.00.31.00.00	Kecamatan Banggae	6.376.614.516	
7.01.0.00.0.00.31.00.00	Kecamatan Banggae	5.406.885.373	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.360.985.373	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.612.633	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.075.113	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.560.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.630.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.920.400	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.146.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.741.445	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.539.675	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.109.735.262	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.049.565.500	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.969.762	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.730.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.230.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.676.910	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.013.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.690.491	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.522.309	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.702.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.429.110	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.798.500	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.798.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.812.068	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.616	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.681.233	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.131.219	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.620.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.060.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.560.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.900.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.900.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.900.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.31.01	Kelurahan Rangas	158.400.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.070.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.600.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.770.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.850.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.700.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.300.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.930.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.430.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.430.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49.500.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.31.02	Kelurahan Banggae	147.600.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.845.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.209.500	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.209.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.800.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.765.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.810.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.625.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.330.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.250.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.250.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.820.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.320.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.155.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.155.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.155.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.600.000	
7.01.0.00.0.00.31.03	Kelurahan Baru	162.830.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.430.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.900.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.900.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.300.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.300.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.640.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.540.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.310.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.810.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.31.04	Kelurahan Totoli	162.860.150	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.337.521	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.520.071	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.205.071	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.025.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.970.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.100.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.060.150	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.150	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.257.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.360.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.437.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.122.629	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.122.629	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.122.629	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.31.05	Kelurahan Galung	138.960.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.360.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.540.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.560.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.900.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.680.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.750.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.460.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.260.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.410.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.410.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.600.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.600.000	
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000	
7.01.0.00.0.00.31.06	Kelurahan Pangali-ali	199.078.993	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.835.993	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.900.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.900.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.230.210	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	697.325	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.861.364	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.851.521	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.459.423	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.832.283	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.627.140	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.246.360	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.246.360	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.443.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.943.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.943.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	122.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.800.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.800.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.800.000	
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	
7.01.0.00.0.00.32.000 0	Kecamatan Banggae Timur	7.777.104.402	
7.01.0.00.0.00.32.000 0	Kecamatan Banggae Timur	6.566.065.868	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.529.077.818	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.712.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.127.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.400.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.185.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.302.282.300	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.157.352.300	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.430.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.864.100	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.600.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.264.100	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.770.563	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.394.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.697.363	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.179.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.740.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.240.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.379.605	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.810.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.569.605	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.329.250	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.853.250	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.256.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.910.800	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.274.300	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.274.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.103.050	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.103.050	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.533.450	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.212.100	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.321.350	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.077.250	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.077.250	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.077.250	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000	
7.01.0.00.0.00.32.01	Kelurahan Labuang	176.809.461	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.899.461	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.400.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.400.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.514.767	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.029.142	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.485.625	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.024.694	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.810.018	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.214.676	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.560.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.560.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.910.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.910.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.910.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	
7.01.0.00.0.00.32.02	Kelurahan Labuang Utara	164.258.058	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.758.058	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.400.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.822.558	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.793.558	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.240.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.389.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.333.500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.724.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.609.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.202.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.700.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.700.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.700.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.800.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.800.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.800.000	
7.01.0.00.0.00.32.03	Kelurahan Lembang	133.890.357	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.564.357	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.680.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.680.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.108.249	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.487.529	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.570.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.001.720	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.049.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.894.108	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.986.225	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.401.479	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.506.404	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.882.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.720.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.552.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.526.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.526.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.526.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.800.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.800.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.800.000	
7.01.0.00.0.00.32.04	Kelurahan Baurung	167.930.369	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.530.369	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.400.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.949.533	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.499.153	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.001.380	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.249.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.520.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.520.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.360.836	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.080.450	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.280.386	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.300.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.400.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.32.05	Kelurahan Tande	143.843.891	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.723.891	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.205.656	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.940.536	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.265.120	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.250.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.250.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.628.235	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.924.075	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.160	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.240.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.510.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.720.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	62.720.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.720.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.32.06	Kelurahan Tande Timur	153.651.086	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.100.436	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.772.065	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.475.215	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.862.850	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.134.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.800.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.658.371	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.254.350	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.404.021	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.870.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.150.650	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.150.650	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.999.780	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.150.870	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.32.07	Kelurahan Baruga	136.998.217	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.999.317	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.110.919	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.005.379	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.126.540	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.979.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.278.398	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.279.850	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.998.548	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.610.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.998.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.998.900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.998.900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	
7.01.0.00.0.00.32.08	Kelurahan Baruga Dhua	133.657.095	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.757.095	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.400.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.538.327	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.017.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.260.007	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.381.320	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.380.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.886.391	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.136.391	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.750.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.917.316	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.209.975	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.207.341	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.015.061	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.533.061	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.232.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.500.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	
7.01.0.00.0.00.33.000 0	Kecamatan Pamboang	3.266.289.630	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Pamboang	2.995.909.030	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.093.030	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.685.738.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.649.695.900	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.042.100	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.860.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.860.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.250.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.451.408	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.634.870	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.936.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.880.038	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.693.622	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.470.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.320.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.903.622	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.800.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.800.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.266.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.266.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.266.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.950.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.950.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.950.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.800.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.800.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.800.000	
7.01.0.00.0.00.33.01	Kelurahan Lalampanua	132.200.600	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.200.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.978.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.978.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.940.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.940.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.922.600	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.934.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.988.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.360.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.360.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	48.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.0.00.0.00.33.02	Kelurahan Sirindu	138.180.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.180.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.150.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.150.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.680.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.050.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.150.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.902.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.072.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.830.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.448.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.448.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	60.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60.000.000	
7.01.00.0.00.34.00.00	Kecamatan Sendana	4.115.207.794	
7.01.00.0.00.34.00.00	Kecamatan Sendana	3.762.050.685	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.707.682.448	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.492.116.400	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.435.116.400	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.588.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.588.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.959.665	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.484.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.995.703	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.879.540	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.799.622	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.926.383	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.999.850	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.926.533	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.092.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.620.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.472.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.328.237	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.328.237	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.328.237	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.040.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.040.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.920.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.600.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.520.000	
7.01.0.00.0.00.34.01	Kelurahan Mosso	171.055.162	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.756.562	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.344.786	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.509.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.001.906	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.213.380	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.820.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.051.776	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.996.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.455.276	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.360.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.360.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.298.600	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.298.600	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.298.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.000.000	
7.01.0.00.0.00.34.02	Kelurahan Mosso Dhua	182.101.947	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.111.947	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.141.232	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.250	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	993.802	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.199.180	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.620.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.030.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.112.115	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.002.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.110.015	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.858.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.360.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.998.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.990.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	99.990.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.990.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.000.000	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Tammerodo	1.665.479.590	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Tammerodo	1.665.479.590	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.580.839.590	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.404.750	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.375	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.951.250	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.984.750	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.992.375	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.415.260.675	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.317.082.300	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.600.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.578.375	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.797.019	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.499.570	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.537.449	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.880.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.897.146	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.528.125	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.969.021	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.480.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.810.000	
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	32.470.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.600.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.600.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	49.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.960.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.960.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.960.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.080.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.080.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.080.000	
7.01.0.00.0.00.36.00 00	Kecamatan Tubo Sendana	2.102.317.868	
7.01.0.00.0.00.36.00 00	Kecamatan Tubo Sendana	2.102.317.868	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.073.190.368	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.103.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.670.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.933.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.847.272.900	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.751.496.900	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.576.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.638.158	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.987.924	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.499.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.350.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.300.434	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.080.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.080.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.416.310	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.550.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.666.310	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.680.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.130.000	
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.720.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.127.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.127.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.127.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	
7.01.00.0.00.37.00 00	Kecamatan Ulumanda	1.691.342.640	
7.01.00.0.00.37.00 00	Kecamatan Ulumanda	1.691.342.640	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.676.742.640	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.246.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.205.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.041.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.479.106.800	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.375.182.800	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.924.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	799.500	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	799.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.505.317	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.324.620	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.740.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.440.697	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.140.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.800.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.340.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.113.023	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.946.613	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.210.290	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.001.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.955.120	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.832.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.280.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.552.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.600.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.600.000	
7.01.0.00.0.00.38.00 00	Kecamatan Malunda	3.702.234.000	
7.01.0.00.0.00.38.00 00	Kecamatan Malunda	3.236.837.220	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.232.337.220	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.030.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.550.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.460.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.550.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.460.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.460.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.920.948.200	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.887.948.200	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.246.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.246.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.083.595	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.451.595	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.632.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.168.925	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.780.025	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.388.900	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.360.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.170.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.500.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.000.000	
7.01.00.0.00.38.01	Kelurahan Malunda	241.400.020	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.400.020	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.200.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.200.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.250.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.250.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.211.270	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.821.270	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.390.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.738.750	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.538.250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	132.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.000.000	
7.01.00.0.00.38.02	Kelurahan Lamungan Batu	223.996.760	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.996.760	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.550.735	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.650.735	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.900.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.946.025	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.449.025	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.947.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.550.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	128.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.768.664.490	
8.01.0.00.0.00.39.00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.768.664.490	
8.01.0.00.0.00.39.00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.768.664.490	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.605.641.250	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.886.960	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.026.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.272.500	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.435.380	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.476.580	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.676.500	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.300.131.450	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.173.982.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.000.000	
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.143.800	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.298.725	
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.706.725	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.992.715	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.628.965	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.243.750	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.120.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.098.625	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.900.000	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.198.625	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.971.500	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.351.500	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.620.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.560.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.560.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	70.536.334	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	70.536.334	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.536.334	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIKDAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.944.307.981	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.944.307.981	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.222.259.575	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	722.048.406	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	32.162.875	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32.162.875	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32.162.875	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	46.015.500	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial danBudaya	46.015.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46.015.500	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	70.000.550	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	70.000.550	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70.000.550	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	452.925.731.201
2	Belanja Barang dan Jasa	152.546.648.515
3	Belanja Hibah	28.893.193.306
4	Belanja Bantuan Sosial	57.600.000
5	BELANJA MODAL	23.697.401.886
	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.910.546.886
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.157.850.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.629.005.000
6	Belanja Tidak Terduga	1.300.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	2.565.228.429
8	Belanja Bantuan Keuangan	105.115.643.800
	TOTAL	767.101.447.137

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 452.925.731.201,00 untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Gaji dan tunjangan DPRD, Gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanjapenerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH.

Plafon Anggaran Sementara Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 152.546.648.515,00 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 berupa belanja barang jasa

Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 28.893.193.306,00 yang diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah kursi, beasiswa Siswa/Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)

Plafon Anggaran Sementara Belanja Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 23.697.401.886,00 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 berupa belanja modal

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.300.000.000,-;

Plafon Anggaran Sementara Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp. 107.680.872.229,00 untuk Dana Desa dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene ke Desa

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	3.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	(3.490.000.000,00)

BAB VI

P E N U T U P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan menjadi pedoman penyusunan RAPBD dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran defenitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

BUPATI MAJENE



H. A. ACHMAD SYUKRI, SE, MM